

STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS INOVASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Yangsa Syeh Saputra¹⁾

1) Prodi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah. Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang signifikan dari peringkat 110 (2022) menjadi 260 (2023), kemudian membaik tipis ke posisi 240 (2024), menandakan adanya masalah mendasar dalam ekosistem inovasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda, perwakilan Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Camat Ngamprah, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian menunjukkan strategi Bappelitbangda belum optimal pada tiga dimensi utama. Dimensi kepemimpinan masih lemah dalam identifikasi dan pemberdayaan individu kunci, transparansi manajemen, serta pemecahan tujuan strategis. Dimensi budaya organisasi menunjukkan ketimpangan antar perangkat daerah dan peran pendukung inovasi yang reaktif. Dimensi lingkungan politik menghadapi kendala hubungan antar-pemerintah yang insidental, lemahnya hubungan profesional, serta pemanfaatan sumber daya eksternal yang terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan inovasi masih sangat bergantung pada figur individu dan bersifat sporadis, belum didukung sistem kelembagaan yang kuat.

Kata Kunci: Strategi, Inovasi Daerah, Bappelitbangda, Indeks Inovasi Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of the Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappelitbangda) of West Bandung Regency in improving the quality of regional innovation. West Bandung Regency experienced a significant decline in the Regional Innovation Index (IID) from 110th in 2022 to 260th in 2023, then a slight improvement to 240th in 2024, indicating fundamental problems in the regional innovation ecosystem. The study employed a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. Research informants were selected using purposive sampling, including the Head of the Research and Development Division of Bappelitbangda, representatives from the Education Office, the DP2KBP3A (Regional Development Planning Agency), the Head of Ngamprah District, and the Archives and Library Office. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model with triangulation of sources and methods.

The results indicate that Bappelitbangda's strategy is suboptimal across three key dimensions. The leadership dimension remains weak in identifying and empowering key individuals, managing transparency, and achieving strategic goals. The organizational culture dimension demonstrates inequalities among regional agencies and a reactive role in supporting innovation. The political environment faces challenges such as incidental intergovernmental relations, weak professional relationships, and limited utilization of external resources. The study's conclusions confirm that innovation success remains highly dependent on individual figures and is sporadic, lacking the support of a robust institutional system. The study recommends strengthening the innovator identification and empowerment system, optimizing the Sikembang platform, and strengthening intergovernmental relations and utilizing external resources.

Keywords: *Strategy, Regional Innovation, Bappelitbangda, Regional Innovation Index*

Pendahuluan

Inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai strategi sistematis untuk mendorong inovasi, meliputi stimulasi kompetisi melalui Lomba Inovasi Daerah (LINDA), penguatan kelembagaan melalui pembentukan *Desk Inovasi*, serta digitalisasi pendataan melalui platform Sikembang.web.id. Berbagai inovasi strategis yang dihasilkan, seperti POTENSI (Pojoy Tensi) yang meningkatkan deteksi dini hipertensi, SACANTING yang menekan angka stunting dari 22% menjadi 4,7%, dan SIDILAN yang mempermudah administrasi kependudukan, telah menunjukkan capaian nyata di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Keberhasilan ini diperkuat oleh

pendekatan kolaboratif lintas instansi dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terobosan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Namun demikian, di balik keberhasilan implementasi inovasi tersebut, capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bandung Barat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan tidak konsisten. Pada tahun 2022, KBB meraih nilai 53,40 dengan peringkat ke-110 dari 415 kabupaten, namun pada tahun 2023 nilai IID anjlok drastis menjadi 39,07 dengan peringkat 260, dan hanya sedikit membaik pada tahun 2024 menjadi 42,02 dengan peringkat 240. Penurunan ini membentuk paradoks antara komitmen berinovasi dan kapasitas mempertahankan kinerja inovasi secara berkelanjutan, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Sumedang yang konsisten meningkat, serta Kabupaten Bandung dan Sukabumi yang berhasil pulih dari penurunan. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah struktural atau kebijakan yang menghambat perbaikan kinerja, sehingga memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat dalam membangun dan meningkatkan kualitas inovasi daerah yang berkelanjutan, dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi semata, melainkan lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam siklus hidup inovasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga implementasi, sehingga dapat dihasilkan suatu kerangka strategis yang mampu meningkatkan kapabilitas internal aparatur dalam menciptakan inovasi yang substantif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta tercermin dalam peningkatan skor IID.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan tiga dimensi strategis inovasi daerah kepemimpinan, iklim organisasi, dan lingkungan politik berdasarkan teori Irwan Noor (2013), yang diperkaya dengan kerangka analitis tahapan strategi pemerintahan dari Mulgan (2020) dan teori difusi inovasi Rogers (2003). Berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif atau hanya berfokus pada aspek kelembagaan, penelitian ini menawarkan pendekatan holistik dengan mengkaji secara mendalam peran Bappelitbangda sebagai *leading sector* dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi inovasi daerah di Kabupaten Bandung Barat, yang belum pernah dikaji sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah. Informan dipilih secara *purposive sampling*, mencakup Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda, perwakilan perangkat daerah berprestasi (Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Kecamatan Ngamprah) dan kurang inovatif (Dinas Arsip dan Perpustakaan), serta staf teknis platform Sikembang.web.id. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan dokumen resmi seperti Renstra Bappelitbangda dan Perbup No. 22/2023.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan), dengan validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta *peer debriefing*. Penelitian dilaksanakan di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat sesuai tahapan bimbingan hingga sidang akhir.

Pembahasan

1. Interpretasi Temuan dalam Kerangka Teori Irwan Noor

Penelitian ini menggunakan kerangka teori Irwan Noor (2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan inovasi daerah ditentukan oleh tiga faktor krusial: kepemimpinan, iklim organisasi, dan lingkungan politik yang kemudian dikenal sebagai LPC Model (Leadership, Organizational Climate, Political Environment). Temuan penelitian di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut belum berjalan secara optimal dan terintegrasi, sehingga menjelaskan mengapa capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bandung Barat mengalami tren penurunan dalam

tiga tahun terakhir, dari peringkat 110 pada tahun 2022 menjadi 260 pada tahun 2023, dan hanya sedikit membaik ke posisi 240 pada tahun 2024.

a. Dimensi Kepemimpinan: Antara Harapan dan Realitas

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dimensi kepemimpinan dalam ekosistem inovasi Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi tiga kelemahan fundamental. Pertama, proses identifikasi individu kunci (*kingpins*) masih berlangsung secara informal dan belum didukung oleh sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda, sistem penghargaan yang dirancang masih bertumpu pada insentif finansial dan pengakuan simbolis melalui penetapan inovasi dalam Peraturan Bupati. Akibatnya, banyak individu yang memiliki bakat inovatif tetapi belum memiliki kesempatan untuk berkompetisi menjadi tidak terdeteksi oleh sistem.

Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa budaya inovasi belum berkembang karena tidak semua pihak menyadari pentingnya inovasi dan bahwa inovasi dapat dilakukan oleh semua pihak. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian tersebut, "*There is still dependence on certain parties to innovate*". Ketergantungan pada pihak-pihak tertentu ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam identifikasi dan pemberdayaan potensi inovasi di seluruh lapisan birokrasi.

Kedua, pemberdayaan individu kunci yang telah teridentifikasi masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Ketidadaan kebijakan formal yang memberikan ruang eksperimentasi, seperti *innovation time off* atau jam kerja khusus untuk riset inovasi, menyebabkan inovasi cenderung muncul sebagai tambahan beban kerja, bukan bagian dari tugas utama pegawai. Di DP2KBP3A, misalnya, inovasi Geprak berhasil meningkatkan jumlah laporan kasus secara drastis dari 30-50 laporan per tahun menjadi 30 laporan per bulan, namun pemberdayaan terhadap tim inovator tidak diimbangi dengan penambahan SDM atau pelimpahan kewenangan yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara peningkatan beban kerja dan kapasitas yang tersedia, yang berpotensi menimbulkan *burnout* dan menurunkan kualitas penanganan kasus.

Ketiga, penerapan sistem manajemen yang transparan (*fishbowl management*) masih sangat terbatas. Platform digital Sikembang.web.id yang dikembangkan Litbang lebih berfungsi sebagai repositori data pasif daripada medium untuk membangun hubungan profesional seperti diskusi atau kolaborasi proyek. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa "*there are still many innovation programs that have been implemented that are not well documented because there is no standard innovation document*". Tanpa adanya dokumentasi yang standar dan transparansi yang memadai, pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan inovasi tidak dapat terdiseminasi secara luas, menyebabkan setiap perangkat daerah cenderung memulai proses inovasi dari awal tanpa bisa mengambil pelajaran dari pengalaman perangkat daerah lain.

Kelemahan dalam dimensi kepemimpinan ini memiliki konsekuensi serius terhadap keberlanjutan inovasi. Penelitian di Kota Bandung mengidentifikasi bahwa "*there are innovations that appear but cannot continue*" karena tidak adanya peta jalan inovasi yang komprehensif. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana inovasi cenderung muncul secara sporadis dan sangat bergantung pada figur pemimpin tertentu. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian tersebut, "*If only top-level leadership plays a role without being supported by leadership at lower levels, then innovation will be difficult to run*". Kebergantungan pada kepemimpinan puncak tanpa penguatan kepemimpinan di level menengah dan bawah menciptakan kerentanan ketika terjadi rotasi atau mutasi pejabat.

b. Dimensi Iklim Organisasi: Ketimpangan Budaya Inovasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum terinternalisasi secara merata sebagai nilai bersama (*shared value*). Ketimpangan budaya inovasi sangat terlihat antara Perangkat Daerah dengan unit layanan masif seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dibandingkan dengan perangkat daerah berskala kecil seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas tekanan pelayanan publik dan jumlah sumber daya manusia menjadi determinan yang lebih dominan dalam

membentuk budaya inovasi dibandingkan dengan kebijakan fasilitasi dari Bappelitbangda semata.

Dalam kerangka teori Hidayah (2018) tentang tiga peran kunci dalam budaya inovasi pencipta konsep (*creative geniuses*), pendukung inovasi (*innovation champions*), dan pemimpin inovasi (*innovation leaders*) temuan penelitian menunjukkan bahwa peran-peran tersebut masih belum berfungsi optimal. Peran pencipta konsep didominasi oleh pimpinan Perangkat Daerah, sementara inisiatif dari tingkat bawah belum terakomodasi dengan baik karena tidak adanya prosedur baku untuk melaporkan potensi inovasi. Dinas Pendidikan, misalnya, mengakui bahwa tidak ada format baku dalam proses identifikasi potensi inovasi dari staf, yang berarti bahwa potensi inovator dari level bawah dapat dengan mudah terabaikan.

Peran pendukung inovasi yang diemban oleh Bappelitbangda masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistemik. Litbang lebih berperan sebagai responden atas permintaan bantuan daripada sebagai penggerak proaktif yang secara terjadwal melakukan pembinaan inovasi. Pernyataan dari Dinas Pendidikan bahwa interaksi dengan Litbang hanya sebatas verifikasi kelengkapan dokumen administratif, bukan pendampingan substantif, mengindikasikan bahwa peran Litbang sebagai *innovation champion* di tingkat kabupaten belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan di Kota Batu yang menunjukkan bahwa Bappelitbangda menghadapi kesulitan dalam memantau pencapaian visi dan misi karena kurangnya peran teknologi dalam mendukung kinerja mereka.

Peran pemimpin inovasi juga masih menghadapi tantangan serius. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah telah diterbitkan sebagai landasan hukum, efektivitasnya masih terbatas karena tidak dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi perangkat daerah yang pasif berinovasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa "*there are no regional regulations that serve as an umbrella for implementing innovations, such as systematic SOPs/Technical Guidelines starting from planning, implementation, monitor and evaluation*". Ketiadaan regulasi yang mengikat dan terintegrasi

ini menyebabkan inovasi tidak berkelanjutan dan kehilangan kepercayaan publik.

c. Dimensi Lingkungan Politik: Keterbatasan Dukungan Eksternal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi lingkungan politik yang mencakup hubungan antar-pemerintah, hubungan profesional, pengaruh sektor swasta, dan kelonggaran sumber daya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hubungan antar-pemerintah dengan provinsi dan pusat masih bersifat insidental dan belum terinstitusionalisasi. Tidak adanya forum harmonisasi IID yang sistematis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebabkan sering terjadi ketidakselarasan antara indikator IID nasional dengan prioritas pembangunan regional. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang inovasi daerah menunjukkan bahwa dukungan legislatif terhadap inovasi belum optimal.

Hubungan profesional antar Perangkat Daerah juga masih lemah. Platform Sikembang.web.id belum berfungsi sebagai medium untuk membangun hubungan profesional seperti diskusi atau kolaborasi proyek. Setiap perangkat daerah cenderung mengembangkan inovasinya secara mandiri tanpa berbagi pengetahuan dengan perangkat daerah lain. Padahal, penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa "*building a network that will be followed by collaborative action and communication in it, will make inclusiveness even higher*". Kolaborasi dan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan menciptakan saling ketergantungan yang dibangun melalui empati dan pemahaman bersama terhadap masalah yang terjadi.

Pengaruh sektor swasta telah berlangsung dalam berbagai bentuk kolaborasi, seperti yang terjadi di DP2KBP3A dengan CSR, PLN, Telkom, UPI, Unjani, Polres, dan Rumah Sakit Parahyangan. Namun, kolaborasi ini masih bersifat kasuistik dan belum dilengkapi dengan tata kelola yang memadai, terutama dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Belum adanya mekanisme baku yang mengatur kepemilikan HKI secara adil menyebabkan inovasi yang lahir dari kolaborasi tidak dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Kelonggaran sumber daya dari pihak eksternal juga belum dimanfaatkan secara optimal. Litbang mengakui bahwa kapasitas untuk

mengakses sumber daya eksternal masih rendah karena terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam penyusunan proposal hibah atau negosiasi dengan donor. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lebih banyak bersifat pertukaran tenaga ahli dan data daripada pendanaan langsung, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan beban anggaran daerah untuk kegiatan riset dan pengembangan inovasi.

2 Analisis Berdasarkan Teori Tahapan Strategi Mulgan (2009)

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima tahapan: *Purpose* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Arahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Bappelitbangda dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah masih menghadapi kelemahan pada setiap tahapan tersebut.

a. Tahap *Purpose* (Tujuan)

Mulgan (2009) menekankan bahwa strategi yang baik harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang alasan mengapa tindakan tertentu perlu dilakukan, serta penilaian apakah tujuan strategis tersebut benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, tujuan pengembangan inovasi daerah telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 yang menempatkan penguatan sistem inovasi sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Namun, temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara formulasi tujuan di tingkat makro dan implementasinya di tingkat mikro. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah memang telah mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk mengembangkan dan melaporkan inovasi, namun regulasi ini tidak dilengkapi dengan sanksi administratif bagi perangkat daerah yang pasif. Akibatnya, inovasi masih dipandang sebagai kegiatan "seremonial" untuk memenuhi target tahunan, bukan sebagai strategi

fundamental untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hal ini tercermin dari ketidakmampuan Kabupaten Bandung Barat mempertahankan kinerja inovasinya dibandingkan kabupaten tetangga. Sumedang konsisten menunjukkan peningkatan dari peringkat 18 (2022) ke peringkat 21 (2024), sementara Bandung Barat justru merosot dari peringkat 110 ke 240 dalam periode yang sama. Kegagalan menerjemahkan tujuan strategis ke dalam target operasional yang terukur dan mengikat menjadi penyebab utama rendahnya komitmen seluruh jajaran birokrasi terhadap inovasi.

b. Tahap *Environment* (Lingkungan)

Mulgan (2009) menyatakan bahwa indikator lingkungan menilai apakah strategi yang dilaksanakan sudah mempertimbangkan keadaan nyata dan kemampuan yang tersedia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bappelitbangda belum sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas internal dalam merumuskan strategi inovasi. Keterbatasan jumlah SDM peneliti, anggaran riset yang terbatas, dan ketiadaan mekanisme pendampingan berkelanjutan menjadi hambatan serius yang belum diantisipasi secara memadai.

Dominasi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai penyumbang inovasi terbesar mencerminkan bahwa strategi pembinaan belum mempertimbangkan secara proporsional karakteristik dan kapasitas berbeda dari setiap perangkat daerah. Perangkat daerah berskala kecil seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan jumlah SDM terbatas dan tekanan pelayanan publik yang rendah tidak mendapatkan perhatian khusus yang sesuai dengan kondisinya. Padahal, sebagaimana diungkapkan Kabid Litbang, strategi pembinaan khusus dengan pendekatan personal dan intensif sebenarnya telah diterapkan, namun hasilnya belum optimal karena rendahnya inisiatif internal dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Selain itu, strategi inovasi belum sepenuhnya memperhitungkan dinamika eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Digitalisasi melalui Sikembang.web.id, misalnya, belum diikuti dengan strategi adaptasi

terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan platform digital yang lebih modern. Akibatnya, platform tersebut lebih berfungsi sebagai repositori pasif daripada ruang kolaborasi interaktif yang dinamis.

c. Tahap *Direction* (Arahan)

Mulgan (2009) menekankan bahwa arahan memastikan apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai dan apakah prioritas serta urutan tindakan strategis sudah sesuai dengan kebutuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arahan dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat instruktif dan administratif, bukan kolaboratif. Pola yang terjadi adalah Bappelitbangda mengundang perangkat daerah untuk mengirimkan inovasi, memverifikasi dokumen, lalu mengumumkan pemenang tanpa adanya forum rutin untuk membahas perkembangan, evaluasi, atau tindak lanjut setelah lomba usai.

Kelemahan dalam tahap arahan ini sangat terlihat dari tidak adanya pendampingan pasca-LINDA. Sebagaimana diakui Kabid Litbang, pendampingan lebih dominan dilakukan menjelang penilaian kompetisi, sementara setelah kompetisi usai intensitas pendampingan menurun drastis. Akibatnya, inovasi yang lahir cenderung bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Perangkat daerah merasa bahwa LINDA lebih sebagai kewajiban tahunan daripada wadah pengembangan kapasitas yang sesungguhnya.

Selain itu, arahan yang diberikan masih bersifat umum dan tidak spesifik untuk setiap perangkat daerah. Tidak ada peta jalan inovasi yang jelas dan terukur bagi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka. Padahal, sebagaimana ditekankan dalam teori kepemimpinan *tipping point* Kim dan Mauborgne, pemecahan tujuan kompleks menjadi unit-unit yang dapat dikelola (*atomization*) sangat penting untuk memastikan setiap bagian organisasi memahami peran dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama.

d. Tahap *Action* (Tindakan)

Mulgan (2009) menekankan bahwa tindakan adalah bagaimana tujuan dicapai melalui strategi rinci, kebijakan, hukum, dan program, serta kepemimpinan inspiratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan

konkret yang dilakukan Bappelitbangda dalam meningkatkan kualitas inovasi masih terbatas pada tiga strategi utama: stimulasi inovasi melalui Lomba Inovasi Daerah (Linda), penguatan kelembagaan melalui Desk Inovasi, dan digitalisasi pendataan melalui Sikembang.web.id. Namun, ketiga strategi ini belum sepenuhnya efektif karena:

- 1) Linda cenderung berorientasi pada hasil jangka pendek dan belum menjamin keberlanjutan inovasi di luar kompetisi. Penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa "*there are still many innovation programs that have been implemented that are not well documented because there is no standard innovation document*". Tanpa dokumentasi yang standar, inovasi sulit untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut.
- 2) Desk Inovasi menghadapi kendala dalam efektivitasnya akibat belum meratanya komitmen kepemimpinan inovasi di seluruh perangkat daerah serta koordinasi lintas organisasi yang belum optimal. Sebagaimana penelitian di Kota Bandung, "*there are still several heads of regional apparatus who understand the importance of a sustainability and sustainability of innovation products in their regional apparatus. The majority do not understand the meaning of innovation management and development, due to their lack of leadership competence in building an innovation in their regional apparatus*".
- 3) Sikembang.web.id belum didukung strategi replikasi yang agresif untuk menskalakan inovasi-inovasi terbaik yang telah terdokumentasi. Platform ini lebih berfungsi sebagai repositori pasif daripada ruang kolaborasi interaktif, sehingga potensinya untuk membangun jejaring profesional dan mempercepat difusi inovasi belum tergali secara optimal.

e. Tahap *Learning* (Pembelajaran)

Mulgan (2009) mendefinisikan pembelajaran sebagai "*systems for understanding not just which actions did or did not work but also whether there is a need to rethink purposes, analyses and chosen directions*." Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran dan evaluasi dalam pengelolaan inovasi di Kabupaten Bandung Barat masih sangat lemah.

Tidak ada jadwal evaluasi yang sistematis dan terdokumentasi, serta tidak ada forum terbuka untuk berbagi kegagalan yang menciptakan budaya birokrasi yang menghukum kesalahan, bukan belajar darinya.

Di Dinas Pendidikan, evaluasi terhadap inovasi lebih banyak dilakukan dalam lingkup tim internal, bukan dalam forum terbuka lintas perangkat daerah. Pola evaluasi yang tertutup ini menyebabkan pengetahuan tentang praktik terbaik (*best practice*) dan pelajaran dari kegagalan (*lesson learned*) tidak terdiseminasi secara luas. Setiap perangkat daerah cenderung memulai proses inovasi dari awal tanpa bisa mengambil pelajaran dari pengalaman perangkat daerah lain.

Akibatnya, terjadi duplikasi upaya dan pemborosan sumber daya. Masalah yang sama dapat terulang di perangkat daerah yang berbeda tanpa ada mekanisme pencegahan kolektif. Ketika kompetisi usai, intensitas pendampingan dari Litbang menurun drastis, sementara tantangan implementasi inovasi di lapangan justru terus berlangsung dan seringkali semakin kompleks. Banyak inovasi potensial yang mandek di tengah jalan tanpa proses evaluasi terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kelemahan pada tahap pembelajaran ini menciptakan lingkaran setan yang menghambat perbaikan berkelanjutan, karena kegagalan di masa lalu tidak dipelajari sehingga kesalahan yang sama terus terulang. Penelitian di Cirebon mengkonfirmasi bahwa pada tahap pembelajaran, tidak ada tindak lanjut evaluasi atau pengadaan pendampingan khusus, yang mengakibatkan program inovasi tidak pernah mencapai perbaikannya.

Kesimpulan

Strategi Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah masih lemah pada tiga dimensi utama: kepemimpinan (identifikasi dan pemberdayaan inovator serta transparansi manajemen belum optimal), iklim organisasi (budaya inovasi timpang antar perangkat daerah dan peran pendukung inovasi lemah), dan lingkungan politik (dukungan eksternal masih insidental dan belum terstruktur). Ketiga kelemahan ini saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang menghambat perbaikan berkelanjutan.

Transformasi strategi dari reaktif-seremonial menuju proaktif-sistemik sangat diperlukan melalui penguatan manajemen SDM, pengembangan platform digital kolaboratif, peningkatan regulasi hingga tingkat Perda, serta strategi diseminasi dan replikasi inovasi yang agresif. Pendekatan holistik WISH (kearifan lokal, inovasi, keberlanjutan, harmoni) perlu diintegrasikan agar inovasi tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga berkelanjutan dan diterima masyarakat.

Daftar Pustaka

Jurnal/Artikel

- Almuarif, Arif. (2023). Peran Perencanaan Strategis dalam Organisasi. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 164.
- Arifin. (2025). Strategi Bappedalitbang Dalam Meningkatkan Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Arifin, M. Z., Sakti, A. B., (2019). Pada Penelitian, Pengembangan, Magelang & Penelitian, Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *URECOL*, 6, 62–64.
- Dedi Juniawan A, W., Litbang, D., Gianyar, K., & Bali, (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan *E-Planning* (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *JIAP* (Vol. 5, Issue 3).
- Eprilianto, D., Oktariyanda, Eka, Y., & Sari, K. (2022). *Inovasi Digital Dalam Sektor Publik: Studi Deskriptif Tentang Value Added Inovasi Pelayanan Kesehatan Jurnal El-Riyasah, Volume 13 Nomor 1*
- Efandi, Rahman, A., Wahyuni, R. W., & Haq, R. A. N. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi dan *Psychological Capital* terhadap Perilaku Kerja Inovatif Industri Kreatif. *Psyche 165 Journal*, 105–111
- Fakrulloh, Z. A. (2018). Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Fikriana. (2023). Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 44–45.
- Hidayah, K., Kusumaningrum, M., Wismono, F. & Amarullah, R. (2018). Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), 249–266.
- Morrisa. (2019). Strategi Inovasi Bisnis untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Organisasi di Era Digital, *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science* (Vol. 2). ALFABETA.
- Romdona, S., Senja Junista, S., & Gunawan, A. Teknik Pengumpulan Data: observasi, wawancara dan kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(Vol. 1), 39

- Saksono. (2019a). *regional development planning management based on research & development and design & innovation*. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 14, 213–226.
- Pratiwi, P., & Ningsih, S. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. In *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* (Vol. 5, Issue 1).
- Simanjuntak, (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bei*, *fundamental management journal* (Issue 1). 254-255
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya *Good Public Policy Governance Innovation of Policy in Public Administration Perspective toward the realization of Good Public Policy Governance*. *Spirit Publik*, 12(2), 15.
- Widjaja. (2024). *Local Engineering Journal of Local Architecture and Civil Engineering-NC-SA 4.0 DEED*) license Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. 2(1).
- Wijiharjono, N. (2013). Perkembangan Manajemen Strategik Dalam Perspektif Teoritis dan Analisis Empiris: *UHAMKA*, 115. Vol. II (Issue 2).
- Yusdianto. (2008). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif*, 486–487.
- Zulfatillah. (2025). Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapperida Kabupaten Bangkalan. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 104–114.